

THE MEANING OF COVID-19 SOCIAL ASSISTANCE FOR THE NEW POOR IN KEDUNGLEGOK VILLAGE, PURBALINGGA, CENTRAL JAVA

MAKNA BANTUAN SOSIAL COVID-19 BAGI MASYARAKAT MISKIN BARU DI DESA KEDUNGLEGOK, PURBALINGGA, JAWA TENGAH

Anif Muchlashin¹, Krisdyatmiko²

^{1,2}Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email Correspondence: anifmuchlashin@gmail.com

ABSTRACT:

The spread of Corona Virus Diseases 2019 or better known as Covid-19 is expanding every day. The public in general is faced with health-related anxiety that threatens them, but for the poor, the concern is not only about health but also economic conditions to survive in the midst of the Covid-19 pandemic. The existence of vulnerable communities who become the new poor is also a problem in itself. Social assistance for communities affected by the Covid-19 pandemic is very important to survive in the midst of the Covid-19 pandemic. The existence of social assistance serves to provide assistance to the poor in the midst of a very tense situation. Regarding the meaning of Covid-19 social assistance and how the condition of the poor recently affected in Kedunglegok Village in providing views on social assistance became the main focus of the researcher's questions.

Keywords: covid-19 pandemic, new poor, social assistance

ABSTRAK:

Persebaran Corona Virus Diseases 2019 atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 semakin meluas setiap harinya. Masyarakat pada umumnya dihadapkan dengan keresahan terkait kesehatan yang mengancam dirinya, namun bagi masyarakat miskin yang diresahkan bukan hanya soal kesehatan melainkan kondisi ekonomi untuk tetap bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19. Adanya masyarakat rentan yang menjadi masyarakat miskin baru juga menjadi permasalahan tersendiri. Bantuan sosial bagi kalangan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 merupakan hal yang sangat penting untuk survive di tengah pandemi Covid-19. Keberadaan bantuan sosial berfungsi untuk memberikan pertolongan pada masyarakat miskin di tengah situasi yang sangat mencekam. Terkait dengan bagaimana makna bantuan sosial Covid-19 dan bagaimana keadaan masyarakat miskin baru terdampak di Desa Kedunglegok dalam memberikan pandangan terhadap bantuan sosial menjadi sorotan utama pertanyaan peneliti.

Kata Kunci: bantuan sosial, masyarakat miskin baru, pandemi covid-19

Article Info

Received	:	July 2022
Accepted	:	July 2022
Published	:	July 2022
DOI	:	https://doi.org/10.30872/psd.v3i2.48

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Persebaran Corona Virus Diseases 2019 atau yang biasa disebut dengan Covid-19 semakin meluas setiap harinya. Begitu banyak korban yang tekonfirmasi positif hingga saat ini. Berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas Covid-19 korban positif sampai akhir Januari 2021 sebanyak 1.037.993 dengan tingkat kesembuhan sebanyak 842.122 dan korban yang meninggal sebanyak 29.331 (Tim Gugus Covid-19, 2021). Pemerintah memberlakukan kebijakan seperti lockdown, karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang menyebabkan masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah guna mematuhi aturan physical distancing demi mengurangi penyebaran dan penularan Covid-19 antar individu. Isu ini kemudian kian berkembang dengan timbulnya masalah-masalah turunan bukan hanya kesehatan akan tetapi isu-isu terkait sosial ekonomi masyarakat.

Masyarakat pada umumnya dihadapkan dengan keresahan terkait kesehatan yang mengancam dirinya, namun bagi masyarakat miskin yang diredakan bukan hanya soal kesehatan melainkan kondisi ekonomi untuk tetap bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19. Adanya masyarakat rentan yang menjadi masyarakat miskin baru juga menjadi permasalahan tersendiri. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 9 April 2020 jumlah pekerja yang dirumahkan sebanyak 1.080.765, yang diberhentikan atau PHK sebanyak 160.067, totalnya mencapai 1.240.832 pekerja. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak sebesar 265.881 pekerja dan jika diakumulasi total pekerja terdampak sebanyak 1.506.713 (Kementerian Ketenagakerjaan, 2020). Angka ini tentu sangat berpengaruh, karena rata-rata yang terdampak adalah kepala keluarga yang menafkahi anggota keluarganya. Selain itu berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2020 dari 1548 responden rumah tangga yang tersebar di 32 provinsi menyatakan lebih dari 50% menyatakan mengalami kendala pada kondisi keuangan keluarga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan 3,1 juta-5 juta lebih banyak terdampak yakni sekitar 95,56% (Nugroho, 2020).

Jika melihat data kemiskinan nasional maka dapat dilihat bahwa angka kemiskinan semakin meningkat berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin turun drastis di tengah pandemi Covid-19. Angka kemiskinan meningkat setiap periodenya dari tahun 2019 sebesar 9,2% dengan total jumlah penduduk sebanyak 24,8 juta jiwa. Hingga diprediksikan akan terus meningkat dikarenakan adanya pandemi Covid hingga mencapai 33,2 juta jiwa. Hal ini berbanding terbalik dengan perekonomian Indonesia yang mengalami kemerosotan pada kuartal I tahun 2020 menjadi 2,97% dari sebelumnya tahun 2019 kuartal I sebesar 5,07%. Kondisi ekonomi yang turun dan meningkatnya kemiskinan di negeri ini menjadi masalah tersendiri bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh SMERU memperkirakan hingga tahun 2021 angka kemiskinan akan meningkat hingga 12,4% dengan jumlah penduduk hingga 8,5 juta penduduk jatuh pada tingkat miskin (Suryahadi et al., 2020).

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2020 menyatakan dengan tegas bahwa bencana Covid-19 merupakan Bencana Nasional non Alam. Melalui kebijakan ini Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah terkait untuk mengalokasikan anggarannya dalam rangka penanganan Covid-19 (Keputusan Presiden (KEPPRES) Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, 2020).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2020 alokasi anggaran untuk Covid-19 pada tahun 2020 sebanyak 677,20 triliun yang terbagi untuk bidang kesehatan 87,55 triliun, pemulihan ekonomi nasional sebanyak 589,65 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk penjaminan keselamatan dan kesehatan masyarakat termasuk tenaga kesehatan serta memberikan kepastian perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin dan perlindungan pada dunia usaha (Barany et al., 2020). Jika dilihat lebih lanjut maka alokasi anggaran diprioritaskan untuk jaringan pengaman masyarakat miskin di tengah pandemi Covid-19.

Jaringan pengaman sosial bagi masyarakat miskin di Indonesia sebenarnya bukan hanya dilakukan ketika pandemi Covid-19, sebelumnya masyarakat miskin juga menerima bantuan seperti program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). PKH yakni subsidi ekonomi bagi masyarakat miskin, KIP subsidi masyarakat miskin untuk program pendidikan keluarga miskin yang masih sekolah, dan program KIS yakni kartu untuk pemberian fasilitas kesehatan secara gratis di kalangan keluarga miskin (Lindiasari, S dan Ramadhani, 2019).

Bantuan sosial bagi kalangan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 merupakan hal yang sangat penting untuk survive di tengah pandemi Covid-19. Keberadaan bantuan sosial berfungsi untuk memberikan pertolongan pada masyarakat miskin di tengah situasi yang sangat mencekam. Temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi, R.S. (Dewi, 2020) yang dirasakan oleh masyarakat miskin Banten yang meninggal dunia karena kelaparan, di Batam, terdapat keluarga yang rela menjual barang-barang rumah tangga yang masih dapat dijual demi makan di hari itu, bahkan di Bogor ada masyarakat miskin yang rela mencuri tabung gas demi sesuap nasi demi makan keluarganya (Dewi, 2020).

Bantuan sosial menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memberikan arti pesan penting sebagai tumpuan pada masyarakat miskin dan rentan miskin dengan adanya pandemi Covid-19. Hal ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi dan bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 sebagai tanggung jawab pemerintah dalam rangka meringankan beban rumah tangga dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan dapat menjangkau lapisan masyarakat terdampak serta membutuhkan bantuan akibat adanya pandemi Covid-19 (TNP2K, 2020).

Hal itu juga terjadi di Purbalingga. Secara umum dengan adanya pandemi Covid-19 jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga naik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 140,1 ribu jiwa sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 149,5 ribu jiwa. Hal ini terdistribusi ke seluruh kecamatan di Purbalingga, salah satunya berada di Kecamatan Kemangkon dengan jumlah keluarga miskin baru pada tahun 2020 sebanyak 2847, yang tersebar ke desa-desa di Kecamatan Kemangkon (B.P.S., 2020). Desa Kedunglegok menjadi salah satu desa terdampak. Salah satu alasannya karena masyarakat Kedunglegok mayoritas bekerja di sektor informal seperti pedagang, pertanian, dan menggantungkan sektor industri sebagai sektor andalan di masyarakat Kedunglegok. Sektor industri terpukul dengan adanya pandemi Covid-19, hal ini menyebabkan banyaknya pengurangan pegawai di industri sehingga menyebabkan meningkatnya masyarakat miskin baru di Desa Kedunglegok. Melalui deskripsi ini sedikit tergambar terkait deskripsi mengenai masyarakat miskin baru dalam konteks penelitian ini, yakni masyarakat yang terdampak dengan sebab pandemi dan mereka dalam kondisi rentan. Berdasarkan temuan awal peneliti terdapat 713 orang yang mendapatkan bantuan sosial khusus Covid-19 yang mengindikasikan warga miskin baru di Desa Kedunglegok (TKSK Kemangkon, 2021).

Jenis bantuan sosial yang dimaksud dengan adanya pandemi Covid-19 berupa bantuan sosial terpadu (BST) Covid-19, jaring pengaman sosial (JPS) dari APBD Provinsi Jawa Tengah, jaring pengaman sosial (JPS) APBD Kabupaten Purbalingga, bantuan langsung tunai dana desa (BLT- DD) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengaman masyarakat melewati pandemi Covid-19 (Sarpono, 2020). Terkait dengan bagaimana makna bantuan sosial Covid-19 dan bagaimana keadaan masyarakat miskin baru terdampak di Desa Kedunglegok dalam memberikan pandangan terhadap bantuan sosial menjadi sorotan utama pertanyaan peneliti. Makna bantuan sosial menjadi fokus utama dalam rencana penelitian ini. Pandemi Covid-19 memiliki arti yang penting dalam setiap individu, termasuk masyarakat miskin baru sebagai obyek penelitian ini. Tahun 2020 memiliki makna tersendiri bagi orang miskin. Makna ini yang kemudian peneliti pilih untuk meneliti lebih jauh terkhusus pada masyarakat miskin dan rentan miskin yang berubah statusnya menjadi masyarakat miskin baru yang terimbas dari bencana pandemi Covid- 19.

1.1. Kerangka Teori

Secara konseptual perlindungan sosial menurut Brunori, P. & O'Reilly M (Brunori & O'Reilly, 2010) terlahir dari keadaan orang miskin terhadap resiko guncangan sosial ekonomi yang semakin jatuh dalam ancaman kemiskinan yang semakin besar, dalam rasa kekhawatiran tersebut maka ada pihak yang harus memberikan perlindungan terhadap kelompok miskin yang bertujuan memberdayakan, melindungi dan mengayomi agar masyarakat miskin dapat melewati resiko dan ancaman tersebut. Referensi lain menyatakan perlindungan sosial merupakan kebijakan sosial yang merujuk pada program atau ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada warga negara terutama pada kelompok miskin dan rentan dari resiko guncangan ekonomi, sosial dan politik yang sedang menerpa dalam kehidupannya (Sarpono, 2020). Undang-Undang nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial secara eksplisit menyebutkan bahwa fungsi perlindungan sosial dilakukan dalam rangka mencegah dan menangani resiko dari kerentanan dan guncangan seseorang, keluarga, masyarakat agar dapat terus memenuhi kehidupannya minimal dari kehidupan dasar.

Lain halnya dengan Suharto (Suharto, 2015) yang mengkonsepkan perlindungan sosial sebagai tindakan pemerintah yang fungsinya mengurangi kerentanan, kemiskinan dan ketidaksetaraan. Perlindungan sosial dalam konsep ini dibedakan dalam 4 skema yakni memberikan bantuan sosial, pelayanan sosial, asuransi sosial dan kebijakan pasar kerja kepada masyarakat miskin (Suharto, 2015).

a. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara individu maupun skala rumah tangga yang miskin dengan konsep solidaritas vertikal sehingga dalam konsepnya tidak mempertimbangkan premi atau kontribusi dari pihak penerima manfaat.

b. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan pelayanan dari pemerintah yang diberikan khusus pada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan akses dan perawatan khusus dalam pelayanan dasar.

c. Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan bagian dari pelayanan pemerintah yang memiliki fungsi utama dalam rangka melindungi masyarakat dalam mengurangi guncangan dan resiko pendapatan yang dibayarkan dari hasil premi atau kontribusi yang telah dibayarkan sebelumnya.

d. Kebijakan Pasar Kerja

Kebijakan pasar kerja merupakan kebijakan dari hasil intervensi publik yang tujuan utamanya dalam rangka memberikan standar ketenagakerjaan bagi masyarakat kalangan pekerja yang kurang beruntung.

Kedudukan dan fungsi perlindungan sosial sangat penting dalam membantu kalangan masyarakat miskin. Sifat perlindungan sosial dapat menjadi penyokong untuk dapat keluar dari zona kemiskinan dan mencegah masyarakat miskin dalam kerentanan ekonomi dan sosial agar tidak jatuh pada garis kemiskinan yang lebih dalam. Perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan pendapatan riil dan meningkatkan kapabilitas dengan skema program dengan cara perbaikan dalam mata pencaharian (Suharto, 2015). Selaras dengan pernyataan tersebut setidaknya terdapat tiga konsep pendekatan perlindungan sosial agar dapat berjalan seimbang. Pertama dengan meningkatkan keamanan dengan cara membantu meningkatkan individu atau dalam skala rumah tangga kemampuan untuk menghadapi segala macam guncangan ekonomi, lingkungan, politik dan guncangan-guncangan lainnya. Kedua, dengan cara meningkatkan kesetaraan dengan perbaikan tingkat kehidupan dalam tangga menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar utamanya menjamin peningkatan kebutuhan konsumsi individu atau rumah tangga miskin. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan dengan menyediakan akses tenaga kerja yang produktif dan membangun soidaritas sosial serta penyediaan lingkungan yang dapat membuat individu atau rumah tangga miskin untuk melakukan adaptasi untuk terus berkembang (Drolet, 2014).

Perlindungan sosial didalamnya terdapat bantuan sosial. Konsep bantuan sosial merujuk pada permendagri nomor 32 tahun 2011 tepatnya pada pasal 1 menjelaskan bahwa bantuan sosial sebagai bantuan yang dilaksanakan dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang dapat berupa uang atau barang yang sifatnya selektif dan sementara dengan tujuan untuk melindungi penerimanya akibat dari adanya kemungkinan-kemungkinan resiko sosial. Secara lebih detail resiko sosial yang dimaksudkan adalah kejadian atau peristiwa yang memungkinkan individu, keluarga, komunitas atau masyarakat mengalami kerentanan sosial akibat dari dampak krisis sosial, ekonomi, politik dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan maka keadaanya semakin terpuruk dan individu, keluarga, komunitas atau masyarakat tersebut tidak dapat memnuhi kebutuhan hidupnya dan tidak melewati kehidupan secara wajar (Sarpono, 2020).

1.2. Konsep Bantuan Sosial

Secara definisi bantuan sosial menurut permendagri nomor 32 tahun 2011 yang secara eksplisit tercantum pada pasal 1 mengartikan bantuan sosial sebagai bentuk bantuan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk uang atau barang yang memiliki sifat selektif dan sementara yang dilakukan dalam rangka melindungi segala bentuk kemungkinan resiko sosial yang dialami oleh kelompok miskin (Kantohe et al., 2018). Referensi lain menyebutkan bantuan sosial adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan non-pemerintah dengan cara memberikan sumber daya kepada individu atau masyarakat rentan yang dirasa untuk mendapatkan hak, fungsi dari bantuan sosial adalah sarana dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kelompok rentan, meningkatkan partisipasi ekonomi sosial dan menambah kesempatan dalam rangka penyetaraan. Pemberian bantuan sosial tujuan utamanya dalam rangka mencegah resiko sosial yang akan berdampak negatif terutama pada individu atau kelompok miskin, mengurangi resiko guncangan dan membantu kelompok rentan miskin dalam rangka mengatasi guncangan sosial dan ekonomi (Alba & Kurniawan, 2019).

Bantuan sosial juga didefinikan oleh (Sumarto, 2014) sebagai bantuan yang diberikan oleh nagara dengan tes pendapatan atau dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini tergantung sekama bantuan yang akan diberikan seperti dalam bentuk subsidi rumah, makanan, energi, pendidikan maupun kesehatan. Namun negara tidak sepenuhnya dapat menutupi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, mereka terus bergantung dan membutuhkan dari jaringan lain seperti dari lembaga-lembaga sosial dan keagamaan (Sumarto, 2014).

Berdasarkan fungsinya menurut Howell, F. (Howell, 2001) bantuan sosial dirancang dalam rangka membaantu individu atau kelompok masyarakat miskin dan rentan dalam mengatasi kesulitan- kesulitan hidup dan krisis yang dihadapi. Akan tetapi ada hal yang perlu diantisipasi dalam pemberian bantuan sosial yang sifatnya sementara agar di masa yang akan datang mereka tidak ketergantungan dengan bantuan sosial salah satunya dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis partisipatif. Hal ini menjadi penting dalam rangka

bantuan sosial bukan hanya meningkatkan kesejahteraan saja akan tetapi kemampuan untuk memberikan kesempatan. Jenis dukungan dan durasi program harus sesuai dengan kebutuhan kelompok miskin dan rentan.

Kunci utama pemerintah dalam memberikan bantuan adalah akankah mengedepankan pemerataan atau efisiensi maksudnya adalah pemerintah memberikan program akankah memberikan kepada banyak penerima namun kurang memberikan dampak atau justru sebaliknya, pemerintah versus non-pemerintah yakni mungkin dapat dibagi antara pemerintah dalam memberikan pemerintah dengan non-pemerintah seperti LSM, lembaga sosial dan keagamaan. Pemberian dalam bentuk uang atau barang, dalam hal ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan sehingga bantuan sosial dapat diterima tepat sasaran (Howell, 2001).

Secara umum manfaat utama dari bantuan sosial adalah mendistorsi harga di masyarakat. Manfaat kedua dari bantuan sosial adalah sebagai penyetabil perekonomian makro, hal ini dapat menolong orang diluar penerima bantuan ketika adanya inflansi maka kebutuhan di masyarakat menurun sehingga harga akan dapat lebih stabil hal ini tentu pemberian barang lebih baik dari pada dalam bentuk uang. Namun kelebihan dengan menggunakan uang para penerima manfaat dapat bebas memilih dan membeli apa yang menjadi kebutuhannya (Sarpono, 2020). Sejalan dengan hal tersebut (Sumodiningrat, 1999) terdapat tiga strategi agar program yang memiliki tujuan membantu individu atau masyarakat miskin yakni bantuan sosial harus disalurkan ke daerah yang memiliki mayoritas miskin dengan penguatan akses infrastruktur dan teknologi, kedua bantuan bersifat kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat miskin dan rentan, dan yang terakhir adalah bantuan bersifat sosio-ekonomi yang bertujuan untuk mempertahankan dan mendorong individu atau kelompok masyarakat agar tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

2. METODE

Penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang disajikan dengan cara deskriptif (Moleong, 1994). Proses analisisnya dengan intepretasi. Paradigma intepretasi adalah salah satu paradigma non positivisme. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang berasal dari filsuf Jerman yang pada penelitiannya menggunakan pemahaman terhadap bahasa, tutur dan pola perilaku manusia dalam kegiatan sosial. Pendekatan interpretatif melihat individu sebagai seseorang yang sadar dan aktif dalam sebuah realitas sosial sehingga setiap orang memiliki pemaknaan yang berbeda dalam melihat dan menafsirkan suatu peristiwa. Realitas sosial diartikan dari serangkaian bentukan dan interaksi antar pelaku sosial yang saling mempengaruhi dalam sebuah lingkungan (Creswell, 2014). Paradigma interpretatif melihat ilmu pengetahuan sebagai cara manusia memahami sebuah peristiwa (Burrell & Morgan, 2010).

Terdapat tiga prinsip dasar yang dimiliki oleh paradigma interpretatif yakni bagaimana individu merespon sebuah peristiwa yang dialaminya dari hasil pemaknaan yang dibuat oleh dirinya sendiri, makna berasal dari interaksi sosial, makna yang diperoleh dan diciptakan dipahami oleh individu tersebut melalui hasil interpretatif hal-hal lain yang dialami oleh individu masing-masing (Soetrisno & Hanafie, 2007). Berdasarkan tiga prinsip dasar pendekatan interpretatif ada beberapa asumsi yang melatarbelakangi yakni individu dapat melihat makna dari dalam dirinya sendiri, kedua individu aktif dalam merespon situasi dan kondisi yang terjadi dalam dirinya. Paradigma interpretatif memfokuskan pada pemahaman pada makna dirinya dari hasil empati dari sebuah tafsiran dan analisis pribadinya sendiri (Creswell, 2014).

Penelitian ini memiliki tujuan utama tentang bagaimana mendiskripsikan makna bantuan sosial yang diberikan pada masyarakat miskin baru di Desa Kedunglegok, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Peneliti telah menemukan data bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin baru, bagaimana prosedur mendapatkan bantuan sosial tersebut dan bagaimana penerima manfaat memberikan makna dari bantuan sosial sebagai bagian dari perlindungan sosial yang diberikan pemerintah dengan adanya pandemi Covid-19. Setelah peneliti mendapatkan data tersebut peneliti mengolah data yang didapatkan dari lapangan dan mendeskripsikan hasil temuan tersebut sebagai bagian dari laporan hasil penelitian.

Lokasi Penelitian berada di Desa Kedunglegok, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Obyek dalam studi ini adalah masyarakat miskin baru yang dipilih sesuai dengan indeks kemiskinan yang telah ditentukan. Informan yang telah menjadi data primer peneliti adalah masyarakat miskin baru yang diambilkan berdasarkan dengan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang awalnya masyarakat rentan miskin (desil 3 dan 4) menjadi sangat miskin dan miskin (desil 1 dan 2) di wilayah Desa Kedunglegok, Purbalingga, Jawa Tengah.

Desa Kedunglegok merupakan salah satu Desa yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga yang menjadi salah satu wilayah terdampak dari pandemi Covid-19. Desa ini memiliki mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani namun tidak sedikit juga yang menjadi wirausaha baik yang berada dilingkungan desa maupun diluar desa, terutama di Ibukota. Pandemi Covid-19 memiliki dampak pada ekonomi yang bearti bagi masyarakat menengah di Desa Kedunglegok karena mereka bertahan hingga kini dengan dana tabungan mereka yang tersisa.

Penentuan informan ditentukan melalui teknik purposive sampling dan dilengkapi melalui teknik snowball sampling. Penentuan jumlah informan dianggap memadai apabila telah sampai pada taraf *redundancy*, yaitu ketika datanya telah jenuh dan tidak ada informasi baru yang didapatkan dari informan baru.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Analisis Interaktif Miles & Huberman (1984). Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data, perpanjangan pengamatan, dan meningkatkan ketekunan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari Kepala Desa Kedunglegok terdapat 273 warga miskin baru di tengah pandemi Covid-19 di Desa Kedunglegok. Awal mula jumlah masyarakat miskin di Kedunglegok adalah 327, kemudian dengan adanya pandemi Covid-19 meningkat menjadi 500.

“Jumlah masyarakat miskin secara umum meningkat ya dengan adanya pandemi Covid-19. Mereka yang awal mulanya merantau sekarang pulang ke rumah, asalnya biaya hidupnya lebih murah”.

Hasil Wawancara dengan Sudarno (49 tahun), Kepala Desa Kedunglegok, 10 September 2021.

Para perantau yang kebanyakan mereka bekerja di Jakarta sebagai pusat perekonomian, dengan adanya pandemi Covid-19 mereka memilih pulang kampung. Beban hidup mereka di kampung halaman dirasa lebih murah dibandingkan dengan di Jakarta. Mereka pada perantau kebanyakan bekerja di sektor makanan, jasa seperti menjadi kuli bangunan, dan jasa transportasi. Pekerjaan ini yang sudah sesuai dengan survei Badan Pusat Statistik (B.P.S., 2020) merupakan pekerjaan yang paling banyak terdampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan penuturan dari Kepala Desa Kedunglegok menyatakan (49) sebelum adanya pandemi Covid-19, mereka para perantau dan para pengusaha mendapatkan gaji dan upah yang layak, standar gaji yang didapatkan di Jakarta lebih dari 3 juta. Uang tersebut sudah dapat memberikan penghidupan ekonomi keluarga yang ada di desa. Sekarang mereka kembali ke desa dan tidak ada penghasilan selama hidup di desa.

“Ada peningkatan sekitar 173 warga miskin baru karena pandemi, mereka berasal dari perantauan dan juga warga desa yang kehilangan pekerjaannya di tengah pandemi”.

Hasil Wawancara dengan Sudarno (49 tahun), Kepala Desa Kedunglegok, 10 September 2021.

Rerata pendidikan mereka yang terdampak pandemi adalah SMA/SMK. Pada era sebelum pandemi mereka dikatakan berhasil dapat pekerjaan yang layak di perantauan dan seringkali menjadi tulang punggung keluarga yang ada di desa, bahkan pada beberapa keluarga mereka membawa keluarganya ke tempat mereka bekerja, namun mereka dapat dikatakan masyarakat menengah rentan, manajemen pengelolaan keuangan mereka masih minim sehingga jika terjadi guncangan ekonomi mereka langsung terdampak dan cenderung sulit untuk survive, termasuk para wirausaha yang ada di desa mereka juga merasakan dampaknya, hanya pegawai pemerintahan yang mereka dapat terus bertahan dalam situasi pandemi ini, karena mereka terus eksis mendapatkan pekerjaan meskipun dalam masa pandemi Covid-19, sehingga ketika ada bantuan terdampak pandemi, Kepala Desa Kedunglegok tidak memberikan bentuk apapun kepada pegawai negeri, kecuali mereka yang masih dalam proses pengabdian/wiyata bakti masih mendapatkan bantuan sosial yang berasal dari berbagai macam kementerian.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2020 menyatakan dengan tegas bahwa bencana Covid-19 merupakan Bencana Nasional non Alam. Melalui kebijakan ini Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah terkait untuk mengalokasikan anggarannya dalam rangka penanganan Covid-19 (Keputusan Presiden (KEPPRES) Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, 2020).

Pandemi Covid-19 yang sudah mulai masuk di Indonesia sejak tahun 2020 tepatnya bulan maret telah dibarengi dengan bantuan sosial yang diberikan masyarakat terdampak yang bersumber dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta ada juga program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sejak pemerintah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 muncul kemudian kebijakan peraturan pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) yang disusul dengan peraturan pengganti undang-undang (PERPPU) yang tertera pada nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara. Melalui Perppu ini pemerintah mengalokasikan melalui APBN sebesar Rp. 405,1 triliun yang diperuntukan dalam rangka pemulihan ekonomi, jaring pengaman sosial dan pemberian insentif perpajakan serta pemberian stimulus usaha (Sarpono, 2020).

Salah satu digulirkannya anggaran yang begitu besar dari APBN adalah untuk jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial tunai yang dalam hal ini pemerintah memberikan sebuah kebijakan berupa stimulan baik berupa uang maupun barang secara tunai agar masyarakat miskin dan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 mampu bertahan dan tidak jatuh dalam lubang kemiskinan yang semakin dalam.

Rerata mereka mendapatkan bantuan BST Perluasan, BNPT Perluasan dan Bantuan dari BLT DD. Beberapa mereka yang membuka usaha juga mendapatkan bantuan BPUM. Berdasarkan data dari Yuli, selaku TKSK Kecamatan Kemangkon bantuan sosial khusus masyarakat terdampak yang mendapatkan bantuan per tahun 2020 di Desa Kedunglegok BST Perluasan sebanyak 128 Orang, Sembako Covid-19 116, JPS Provinsi Jawa Tengah 90, JPS Kabupaten Purbalingga 220, BLT DD sebanyak 158 (Yuli, 2021).

Hampir seluruhnya mendapatkan bantuan, mereka mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) perluasan serta ada juga yang mendapatkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Provinsi atau Kabupaten dan yang belum masuk pada bantuan di atas maka akan di back-up di bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD).

Jelas data yang digunakan adalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), kemudian yang belum masuk dikumpulkan melalui RT, dari RT kemudian mengusulkan melalui musyawarah data khusus (MUSDESUS). Proses ini harus mereka lewati karena kebanyakan mereka tidak masuk dalam data DTKS karena mereka kategori mampu pada saat pendataan sebelumnya. Sebenarnya data ini juga tidak begitu membantu ya, karena lihat saja 5 tahun setelah diberikan bantuan harusnya mereka kaya atau minimal keluar dari kemiskinan, tapi nyatanya mereka justru ketergantungan dari bantuan tersebut. Sehingga seharusnya ada upaya lain dari pemerintah salah satunya adalah dengan meningkatkan ketrampilan sehingga akan meningkatkan ekonomi dan menjauhkan masyarakat dari ketergantungan.

Sesuai dengan arahan dari pemerintah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagian digunakan untuk bantuan sosial penanganan Covid-19. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan padat karya, yakni kegiatan kerja yang langsung dibayarkan dan memperkerjakan orang miskin. Pada pelaksanaannya program padat karya bagaimana Pak? Pada pelaksanaan tahun 2020/2021 belum ada pembangunan padat karya, harapannya nanti dari program padat karya yang nantinya dapat diikuti oleh 50% masyarakat miskin dan 50% terdampak. Lalu apakah ada protes dari masyarakat? Tidak ada protes, karena masyarakat terdampak juga kesulitan kerja. Harga kuli di Kedunglegok sekitar 70.000.

3.1. Strategi Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19

Mayoritas masyarakat miskin baru memilih pulang kampung untuk menekan pengeluaran di tengah pandemi, sembari menunggu kebijakan PPKM berakhir mereka melakukan pekerjaan apapun yang ada di desa meskipun harus memulai dari 0. Diantara mereka ada juga yang menekuni pekerjaan pertanian dan perdagangan meskipun mereka tidak banyak tahu dasar skill dan pengetahuan, yang penting kebutuhan keluarga tercukupi.

Ibu Supriatin (35) yang beralamat di Desa Kedunglegok RT/RW 10/05 awal mulanya bekerja sebagai karyawan di PT Kayu Lapis, begitu juga dengan suaminya yang bekerja sebagai karyawan tetap di sebuah PT besar. Awal mulanya keluara Ibu Supriatin kecukupan untuk menghidupi keluarga dengan seorang anak, namun dengan adanya pandemi Covid-19 Ibu Supriatin keluar dari PT efek karena pandemi dan suaminya bekerja hanya 3 hari dalam seminggu, biasanya dalam pekerjaannya dibutuhkan hingga lembur namun karena pandemi hasil olahannya tidak terserap seperti biasanya sehingga terpaksa dari pihak PT melakukan pengurangan jam kerja.

3.2. Diskusi

Jurnal Gift Giving in Anthropological Perspective karya Sherry (1983) dalam penelitian Sherry terkait pemberian lebih menekankan terkait makna hadiah atau pertukaran, proses dan timbal balik hadiah, latar belakang pemberian hadiah, motif tersembunyi dari pemberian atau hadiah dan transaksi, fungsi hadiah atau pemberian, tipologi pemberian dari seseorang atau kelompok, atau korporasi yang dilihat dari segi timbal balik baik peningkatan rasa hormat, kasih sayang ataupun ikatan sosial antara penerima dengan pemberinya, yang dimana jika dikaitkan dengan penelitian saya bahwa bansos bentuknya tidak sama dengan pemberian/hadiah sedangkan dalam fokus penelitian ini bantuan sosial diartikan sebagai pemberian dari negara baik berupa uang atau barang kepada masyarakat miskin atau rentan miskin masyarakat agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan fungsi lain menjaga perekonomian tanpa mensyaratkan adanya kontribusi iuran tertentu.

Berdasarkan referensi lain dari (Sumarto, 2014) mendefinisikan lain mengenai klientelisme dengan membaginya menjadi dua yakni bersifat makro dan mikro. Pada lingkup makro diartikan sebagai suatu relasi antar aktor atau sejumlah aktor yang bersifat emosional, personal, dan resiprokal dalam rangka mengontrol sumber daya yang timpang dan melibatkan transaksi yang saling menguntungkan sedangkan dalam referensi lain menyebutkan klientelisme sebagai suatu relasi antar individu yang memiliki status yang tidak setara yakni seorang patron dan kliennya yang melibatkan timbal balik antara barang dan pelayanan berdasarkan suatu

jaringan personal yang dirasakan oleh keduanya sebagai suatu kewajiban moral (Sumarto, 2014). Klientelisme juga diartikan sebagai suatu relasi personal dua arah yang bersifat asimetris dan resiprokal di mana seorang patron memberikan barang atau wujud materi lainnya yang diperlukan oleh kliennya untuk ditukar dengan loyalitas dari klien kepada patronnya. Sedangkan klientelisme yang bersifat mikro lebih terfokus kepada pertukaran barang atau pelayanan- pelayanan sosial untuk mendapatkan dukungan politik. Klientelisme diartikan sebagai pertukaran antara suara pemilih atau bentuk dukungan politik lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan (Sumarto, 2014).

Konsep klientelisme sering ditempatkan dalam posisi yang sama dengan konsep patronase. Konsep patronase didefinisikan sebagai suatu relasi dua arah ketika seseorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan kepada orang lain yang memiliki status ekonomi lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron. Jika dilihat lebih dalam terdapat beberapa karakter yang memberikan ciri spesifik patronase. Dalam karakter tersebut tercakup relasi antara patron dan klien yang memiliki sifat informal, personal, resiprokal, sukarela, bersifat dua arah dan tidak setara. Namun relasi dua arah dapat berubah menjadi relasi tiga arah apabila dalam suatu komunitas patron juga dapat berfungsi sebagai broker untuk menjembatani relasi klien mereka dengan pihak-pihak lain di luar komunitas mereka. Konsep broker yang juga dikenal sebagai konsep middleman atau mediator diartikan sebagai orang yang menjembatani relasi antar anggota komunitas yang kurang memiliki akses untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berada di luar komunitasnya dan mereka yang berada di luar komunitasnya yang memiliki jaringan yang luas (Sumarto, M. 2014:35). Terkait adanya patron dan klien dalam bentuk klientelisme melalui hasil penelitian saya ini tidak terbukti dari metode penelitian yang diterapkan dilapangan.

4. KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 benar-benar menyebabkan krisis kesehatan yang menyebabkan pemerintah mengambil cara untuk menyelamatkan warganya agar tidak semakin meluas dan mencelakakan banyak korban. Hingga saat ini Indonesia telah melewati gelombang kedua dengan kasus kematian 139.682 orang per 16 September 2021. Sejumlah aturan seperti phisycal dan social distancing menyebabkan masalah turunannya muncul dan menjadi masalah baru di masyarakat.

Muncul masyarakat miskin baru akibat kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Perekonomian keluarga masyarakat yang awalnya menengah jatuh menjadi rentan bahkan menjadi miskin. Mereka yang terutama bekerja di sektor informal dalam mendapatkan kecukupan ekonomi keluarga justru menjadi masalah yang menyebabkan terpuruknya ekonomi keluarga. Perantauan yang menjadi hal yang menyilaukan dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi berubah. Pulang ke kampung halaman dan hidup seadanya menjadi alternatif pilihan sembari menunggu situasi membaik dan dapat membangun perekonomian keluarga kembali.

Alih-alih sembari menunggu pandemi Covid-19 selesai mereka para masyarakat menengah mengandalkan tabungan yang mereka kumpulkan selama bekerja untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga sementara. Beberapa membangun bisnis serupa dan mencoba berdamai dengan keadaan yang tidak dapat diprediksi kedepannya. Dua tahun telah berlalu, namun sampai sekarang ini tabungan mereka semakin menipis dan bahkan tidak cukup sehingga mereka perlu untuk menerapkan strategi untuk bertahan hidup, adanya bantuan sosial bagi mereka adalah bantuan sementara di tengah pandemi Covid-19 yang keberadaannya dirasa cukup membantu di tengah pandemi Covid-19.

Kebutuhan yang justru semakin meningkat seperti kecukupan pangan keluarga yang semakin ditingkatkan mutu gizinya dan hal ini sebanding dengan pengeluaran, kebutuhan vitamin untuk mencegah masuknya penyakit di tengah pandemi dan kebutuhan anak akan HP pinat (smartphone) dan kuota harus disiapkan untuk melaksanakan sekolah daring guna melaksanakan pembelajaran dari rumah yang justru dirasakan semakin merepotkan keluarga dan beberapa kasus keluarga lain dirasa menambah beban ekonomi keluarga.

Berbagai bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 telah pemerintah berikan untuk menolong masyarakat terdampak dalam melewati masa genting di tengah pandemi seperti bantuan sosial sembako, bantuan sosial tunai perluasan, bantuan sembako JPS Provinsi Jawa Tengah, JPS Kabupaten Purbalingga dan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa, namun bagi mereka bukan menjadi jalan yang menyilaukan. Bagi mereka mendapatkan bantuan yang diterima dan tidak mendapatkan bantuan juga tidak mengapa. Hal yang menjadi keinginan narasumber justru ingin segera dunia membaik dan aktifitas perekonomian dapat kembali seperti semula.

Kebiasaan hidup yang bercukupan bagi mereka adalah rutinitas keseharian. Usaha dan do'a adalah jalan mereka untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga, bantuan bukan menjadi cita-cita dalam kamus hidup mereka. Berbagai upaya mereka lakukan di kampung halaman guna mencukupi kebutuhan keluarga meskipun dengan hal-hal yang berbeda dari keseharian di Ibukota dalam mengais rezeki. Mereka yang awalnya menjadi

tenaga masak di Ibukota kini menjadi alih profesi menjadi petani di ladang, petani di pekarangan, pedagang keliling, pedagang sayur keliling dan banyak pekerjaan lain yang mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan keseharian.

Cara mereka melihat bantuan sosial dan bagaimana kehidupan mereka dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi sebuah role model untuk masyarakat miskin yang saat ini terjebak pada zona nyaman dengan adanya bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Mental mereka dan pandangan terhadap sistem ekonomi yang dapat ditiru agar keluarga mereka dapat keluar dari zona kemiskinan yang laten.

Masyarakat miskin baru yang menjadi objek penelitian ini menjadi sebuah pembelajaran yang baik bagi peneliti untuk melihat bahwa orang yang berada di keadaan miskin bukan sesuatu yang seharusnya dibelaskasihani namun seharusnya dapat diberdayakan melalui pola pikir yang tidak pantang menyerah dengan terus berusaha mencari cara agar setiap usahanya dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Ada atau tidak ada bantuan dari pemerintah bukan tujuan utama, namun tempat meminta adalah kembali ke Tuhan yang Maha Segalanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alba, A., & Kurniawan, R. (2019). *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*. UNIMAL Press.
- B.P.S. (2020). *Purbalingga dalam Angka*. BPS.
- Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjangkau Sesuai Sasaran? *Jurnal CSIS*, 2(1).
- Brunori, P., & O'Reilly, M. (2010). Social Protection for Development: A Review of Definitions. *European Report on Development*.
- Burrell, G., & Morgan, G. (2010). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*. Heinemann Educational Book Ltd.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dewi, R. S. (2020). *Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, Covid-19*.
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyaluran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19->
- Drolet, J. L. (2014). *Social Protection and Social Development International Initiatives*. Springer.
- Howell, F. (2001). Social Assistance – Theoretical Background. In I. Ortiz (Ed.), *Social Protection in the Asia and Pacific*. Asian Development Bank.
- Kantohe, A. J., Lumingkewas, G. S., & Nangoi, G. B. (2018). Ipteks Pemberian Dana Bantuan Sosial pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Utara. *Provinsi Sulawesi Utara, Dalam Jurnal Ipeks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 2(02).
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2020). *Badai Pasti Berlalu Panggil Pekerja yang Ter PHK nanti*.
<https://www.kemnaker.go.id/news/detail/menaker-badai-pasti-berlalu-panggil-kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti>
- Moleong. (1994). *Phenomenological Research Methods*. SAGE Publication.
- Nugroho, A. E. (2020). *Survei Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia*.
<http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-rumah-tangga-indonesia/22123>
- Sarpono. (2020). *Bantuan Sosial Tunai kementerian Sosial bagi Keluarga Terdampak Covid-19*. Kementerian Sosial.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, (2020).
- Soetrisno, & Hanafie, R. (2007). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. CV Andi Offset.
- Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus pada. *Jurnal Sosiohumaniora*, 17(1).
- Sumarto, M. (2014). *Perlindungan Sosial dan Klientelisme : Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum*. UGM Press.

Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suryahadi, A., Izzati, R. Al, & Suryadarma, D. (2020). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. SMERU Research Institute.

TNP2K. (2020). *Kecukupan dan Cakupan Manfaat Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19*. TNP2K.
